

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pelayanan publik yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Seseuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal bahwa urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepeningnan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa dalam kaitannya Kepala Daerah mempunyai urusan wajib dalam hal pelayanan publik terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kinerja pegawai sebagai salah satu fungsi manajemen juga ikut berperan penting sebagai faktor pendorong atau penggerak pegawai, sehingga diharapkan pegawai bersedia bekerja keras dan bersungguh-sungguh dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan serta pengalaman yang dimiliki dalam pencapaian tujuan organisasi. Mangkunegara (2002:67) mengemukakan: “istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (pretasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dapat dicapai seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”. Pegawai dengan kinerja baik apabila mampu menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas hasil yang ditetapkan. Aspek kualitas kinerja pegawai bukan hanya kualitas hasil kerja, tetapi juga menyangkut kualitas proses untuk mencapai hasil kerja tersebut apakah dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam organisasi. Kualitas proses kerja ini menyangkut perilaku pegawai dalam bekerja.

Kinerja pegawai juga memiliki hubungan kuat dengan pencapaian tujuan organisasi. Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:7) mengemukakan: “Sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi”. Kinerja pegawai mencakup tentang bagaimana melakukan pekerjaan dan hasil yang dapat dicapai dari pelaksanaan kerja tersebut. Kinerja pegawai adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pegawai mencakup hasil kerja dan proses kerja. Hasil kerja adalah apa yang telah dikerjakan pegawai yang biasanya diukur dari hasil kerja secara kuantitatif dan kualitas. Proses kerja mencakup bagaimana cara pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, misalnya apakah sesuai dengan prosedur atau mekanisme kerja secara legal atau tidak apakah sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma dan etika yang berlaku dalam organisasi atau tidak. Hal ini sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan, sebab tanpa adanya kinerja baik, seorang pegawai tidak akan mampu mencapai produktivitas kerja yang tinggi walaupun dilandasi oleh kemampuan dan pengalamannya. Dengan kerja yang baik, maka prestasi kerja dan perilaku kerja pegawai akan terlaksana dengan baik. Untuk melaksanakan semua tugas dan fungsinya di dalam organisasi dengan efektif dan efisien sehingga berhasil mencapai tujuan organisasi.

Dalam peningkatan kinerja pegawai agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, perlu diperhatikan sikap dasar pegawai

terhadap diri sendiri, kemampuan dan keterampilan (kompetensi), dan pekerjaan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas, Organisasi sangat mengharapkan agar pegawai dapat bekerja dengan baik. Namun pegawai yang berkemampuan tinggi tapi tidak mampu berprestasi dalam bekerja. Pada saat ini faktor disiplin kerja dan motivasi kerja pegawai yang tinggi sangat diperlukan.

Faktor kedisiplinan memegang peranan amat penting dan menentukan dalam pelaksanaan kerja pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Pegawai yang mempunyai kedisiplinan tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Pegawai yang berdisiplin tidak akan menyia-nyiakan waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas pekerjaannya. Demikian juga pegawai yang memiliki kedisiplinan akan menaati segala peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran tinggi tanpa ada rasa paksaan. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja tinggi akan mampu menghasilkan kinerja baik, karena waktu kerja di manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Faktor motivasi kerja pegawai juga tidak kalah pentingnya dalam meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi. Motivasi menjadi pendorong pegawai untuk melaksanakan suatu kegiatan (bekerja) guna mendapatkan hasil kerja yang terbaik atau berhasil mencapai tujuan tertentu. Karena itulah, tidak mengherankan apabila pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi biasanya mampu menghasilkan kinerja baik pula jika dibandingkan dengan pegawai yang malas (kurang memiliki motivasi kerja).

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagai instansi yang bergerak dibidang pelayanan, yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana membantu dan melayani masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan dan kepentingannya. Oleh karena itu, agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu, instansi menuntut adanya upaya dan kinerja dari seluruh pegawai. Setiap pegawai yang bertugas dibidang pelayanan memiliki tanggungjawab untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin.

Realita pelayanan publik dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini masih menjadi keluhan masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah dikatakan masih kurang memuaskan. Padahal kepuasan masyarakat menjadi sasaran utama bagi pemerintah. Kinerja pegawai sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kesuksesan suatu kantor.

Namun pada dasarnya di sektor publik yang menggunakan birokrasi sebagai alat melaksanakan pekerjaan, cenderung menghambat munculnya tanggungjawab, inovasi, kompetensi, dan adaptasi. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh sector publik atau birokrasinya adalah untuk menubah paradigmanya menjadi *customer driven* dan berorientasi pada pelayanan. Untuk itu, motivasi kerja pegawai perlu dibangkitkan atau ditumbuh kembangkan agar pegawai dapat menghasilkan kinerja baik dalam mencapai tujuan organisasi.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan sistem yang berfungsi untuk mengelola data-data kependudukan yang bertujuan untuk menata sistem informasi kependudukan sehingga tertib administrasi dapat tercapai. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta persebaran yang tidak merata menjadi sumber permasalahan yang berkaitan dengan kependudukan. Permasalahan tersebut antara lain adalah kemiskinan, kesehatan dan pengangguran. Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal maupun nasional. Data tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka pengendalian jumlah pertumbuhan dan pemerataan persebaran penduduk. Selain itu informasi juga sangat di butuhkan dalam penyusunan strategi dalam upaya menanggulangi permasalahan kependudukan. Kemajuan teknologi khususnya di bidang informasi pada dasa warsa terakhir ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena semakin pentingnya informasi dan pengolahan data di dalam aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi, dalam hal ini penggunaan komputer dan jaringan internet dapat

menunjang pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi modern yang memungkinkan pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi modern dapat diselesaikan secara tepat, akurat, dan efisien. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat kini menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja yang konvensional ke era digital. Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintahan tradisional (*traditional government*) yang identik dengan paperbased administration menuju *electronic government* atau *e-government*.

Melalui *e-government*, pemerintah akan dikelola melalui jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Pada saat ini teknologi informasi dan komunikasi juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hampir semua aspek terutama pada sektor pemerintahan. Hal ini sangat mendukung berbagai macam kegiatan pemerintah, termasuk dalam kegiatan pelayanan administrasi kependudukan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi serta penyebarannya yang tidak merata menimbulkan berbagai macam masalah terutama dalam administrasi kependudukan, oleh karena itu para penyelenggara negara dituntut untuk bekerja lebih keras mulai dari pemerintah tingkat pusat hingga ke tingkat pemerintah paling bawah terkait dengan pengumpulan data kependudukan secara lengkap dan akurat serta sesuai yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi informasi mengenai kependudukan untuk merumuskan sebuah kebijakan ataupun program dalam menanggulangi permasalahan dalam administrasi kependudukan. Untuk itu Pemerintah Pusat telah menyiapkan suatu sistem yang diberi nama “Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi

kependudukan sehingga tercapailah tertib administrasi serta membantu bagi petugas di jajaran pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penerapan sistem informasi administrasi kependudukan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) No. 88/2004 tentang pengelolaan administrasi kependudukan Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan data kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan yang selanjutnya memasukan data-data tersebut kedalam satu pusat data (data center) di Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan.

Keberhasilan dalam penyampaian informasi administrasi kependudukan pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait didalamnya, seperti kepala dinas, sekretaris dinas, bidang pelayanan kependudukan, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sub bagian umum dan kepegawaian, waktu, biaya, dan masyarakat itu sendiri. Semua faktor tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena akan berdampak pada pencapaian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang maksimal.

Adapun, permasalahan yang terjadi di Bidang Informasi Administrasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi berkenaan dengan pelaksanaan Kinerja Pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan petugas dalam menyampaikan informasi administrasi kependudukan dalam menyapaikan informasi terkait dengan persyaratan untuk membuat akta kelahiran, akta kematian dan lain sebagainya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anwar selaku masyarakat Cikarang Barat yang sedang melakukan pembuatan surat-surat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 30 Oktober 2023 mengatakan bahwa :

“kinerja pegawai dalam menyampaikan informasi kurang optimal dikarenakan media sosial yang kurang aktif serta kurang terbukanya pegawai terhadap masyarakat”

**Tabel 1.1 Data Absensi Pegawai Bidang Informasi
Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi**

HARI DAN TANGGAL :

WAKTU :

No.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. H Carwinda, M.Si NIP. 196701091987101001	Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Dinas		
2.	Drs. Robert Suwandi, SH, MM NIP. 19740311994031002	Pembina Tk.I IV/b	Sekretaris Dinas		
3.	H. Pirso, S. Sos, M. Si NIP. 196905052007011017	Penata Tk.I III/d	Kepala Subagian Umum & Kepegawaian		
4.	Achmad Syarief, SE, M.Si NIP. 197403092006041006	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
5.	Ibnu Abdillah, S.Kom NIP.199209292020121004	Penata Muda III/a	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		
6.	Ujang Suryadi, S.Kom NIP. 199312082020121013	Penata Muda III/a	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		
7.	Budi Rokhili, SE NIP. 197707092014091001		Pengelolaan Data Base		

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

KETERANGAN TIDAK HADIR

- SAKIT (SKT) :
- IZIN :
- CUTI (CT) :
- DINAS LUAR (DL) :
- TERLAMBAT (TLB) :
- PENDIDIKAN (PDDK) :
- TANPA KETERANGAN (TK) :

Bekasi,.....2023

Dr. H Carwinda, M. Si

NIP. 196701091987101001

2. Tanggungjawab dalam penyelesaian tugas juga masih kurang karena masih ada beberapa pegawai yang menunda-nunda pekerjaannya sehingga pekerjaan menjadi terhambat dan menumpuk.

Dari hasil pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi masih kurang baik sehingga mengakibatkan ketidak efisiennya dalam pelayanan kepada masyarakat.

Masalah tersebut menurut dugaan penulis hal ini karena kurangnya evaluasi dan tidak tegas pemimpin terhadap pegawai layanan melalui web sitepak yang masih dijumpai eror atau lamanya dalam mengupdate an data dari masyarakat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang tidak optimal yaitu:

1. Keterlambatan dalam penyampaian informasi

Ketelambatan dalam penyampaian informasi melalui media sosial yang kurang aktif terkait dengan syarat untuk pembuatan administrasi kependudukan, sehingga masih banyak masyarakat

yang mengurus secara offline dengan datang ke Dinas untuk mengurus syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk membuat administrasi kependudukan.

2. Keterlambatan dalam penyelesaian tugas administrasi kependudukan Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang prima atas segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaannya, aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tidak dapat menyelesaikan tugasnya sesuai waktu yang ditentukan dan masih kurang efektif dimana layanan pada sosial media dan web sitenya yang masih kurang aktif dalam menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Berkaitan dengan web Sitepak yang masih sering dijumpai error sehingga petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat mengalami sedikit hambatan.

Sementara itu jadwal pelayanan yang dibuat dan disepakati oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, yakni hari senin s/d jum'at jam 08 : 00 – 15 : 00 WIB dalam hal ini sering kali aparatur dinas datang terlambat dan pulang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Berikut adalah jadwal pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi :

Tabel 1. 2 Jadwal Pelayanan Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

Hari	Jam	Keterangan
Senin s/d Kamis	08 : 00 s.d 16 : 00 WIB	
	12 : 00 s.d 13 : 15 WIB	Istirahat
	13 : 20 s.d 15 :30	
Jum'at	08 : 00 s.d 15 : 00 WIB	
Sabtu		Tidak Ada Pelayanan

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi masih belum optimal. Memperhatikan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan proposal skripsi yang berjudul :

“Kinerja Pegawai Bidang Informasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bekasi”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam penyampaian informasi di Kabupaten Bekasi ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pokok permasalahan di atas, adapun tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian informasi di Kabupaten Bekasi.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat mengatasi hambatan yang dihadapi Bidang Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian. Signifikansi penelitian terbagi menjadi dua yaitu, signifikansi akademik dan signifikansi praktis. Antara lain:

1.4.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan permasalahan yang diambil peneliti tentang “Kinerja Pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bekasi” adapun hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini dan menjadi sumber referensi bagi peneliti, yaitu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Hendri Dunan dan M Yogi Syaputra (2023)	Pengaruh Hubungan Kerja dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Hubungan Ketenagakerjaan dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan asosiatif kausal. Sampel yang diteliti berjumlah 112 responden.
2.	Saiful Anwar, Anwar, Razaili (2023)	Kinerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie	Hasil pengabdian masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan beberapa faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam pelaksanaannya dan beberapa faktor yang menjadi kendala dalam

			pelaksanaannya antara lain, terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagian masyarakat masih kurang memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kependudukan.
3.	Sri Sundari, Meychi. Ady Achadi (2021)	Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	kompetensi, motivasi dan komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai.
4.	Sovia Tirza Tandi Pali, Gustaaf B. Tampi, avery Y. Lomda (2021)	Pemanfaatan E-Government Dalam Pelaksanaan Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pecatatan Sipil Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan	pemanfaatan e-government ini yang direlasikan oleh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dapat memberi manfaat bago kinerja pegawai dalam memberikan pelayanannya ada kepada masyarakat,

			berdasarkan pemberian pelayanan yang baik dan efektif, dalam meningkatkan efisiensi, serta dalam pemberian informasi kepada publik secara merata.
5.	Yuyu Yuhainah (2023)	Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya	Hal ini dapat dilihat pada tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan, tingginya semangat dan gairah kerja dan insentif oleh para karyawan dalam melakukan pekerjaan, besarnya rasa tanggung jawab rasa solidaritas yang tinggi dikalangan pegawai dan meningkatkan efisiensi dan kinerja para pegawai.

6.	Wahyuni, NW Sitiari, IM Sara (2021)	Kinerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepegawaian menjadi sangat penting bagi organisasi dalam rangka mengelola, mengatur dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya tujuan organisasi. Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam perbaikan pelayanan.
----	---	---	---

7.	Prastyadi, Iwan (2021)	Kinerja Pegawai Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pada Masyarakat Di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo	kinerja pegawai dalam Pelayanan pembuatan akta kelahiran pada masyarakat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo sudah cukup baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, timelines, Cost effectiveness dan Interpersonal impact. Upaya meningkatkan kinerjapegawai dalam Pelayanan pembuatan akta kelahiran pada masyarakat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tebo dengan menerapkan rasa disiplin kerja yang baik
----	---------------------------	--	---

8.	Anis Tia, Sri Wahyu Handayani (2022)	Analisis Kedisiplinan Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil	Hasil dari peneliti ini mengungkapkan kedisiplinan kinerja yang dilakukan baik melakukan dan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang dibutuhkan masyarakat sehingga masyarakat merasa pelayanan yang diberikan sudah baik, walaupun masih terhambat dengan adanya fasilitas dan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
9.	Debyla Salshalina Ardil, Isna Fitria Agustina (2024)	Analisis Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kualitas kinerja pegawai sudah baik dalam penggunaan teknologi informasi yang digunakan. Dari kinerja pegawai yang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; Kuantitas kinerja pegawai sudah

			cukup optimal. Dalam pengerjaan dokumen dengan jumlah banyak. Meskipun terkendala dengan server pegawai pelayanan sudah baik dalam tugasnya; Ketepatan Waktu kinerja pegawai sudah cukup optimal.
10.	Khalyza Qaedaniesia Wibowo, Mawar (2024)	Analisis Kinerja Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang	Kinerja pegawai masih perlu ditingkatkan lagi karena penempatan kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya. Pada indikator kuantitas kerja, dapat dikatakan sudah baik dikarenakan rencana pekerjaan disetiap tahunnya dapat terlaksana dengan

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas terdapat persamaan hingga perbedaan yang menjadi kaca perbandingan dari penelitian ini. Persamaannya adalah membahas tentang kinerja pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan yang membedakannya ialah penelitian ini akan berfokus pada bagaimana kinerja pegawai dalam bidang sistem informasi administrasi kependudukan dengan menggunakan teori Hasibuan (2007:95).

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, untuk:

1. Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas “45” Bekasi. Dan untuk menambah pengetahuan penulis, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan kinerja pegawai.

2. Pengembangan Ilmu Pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat menambah bahan referensi penelitian untuk dipakai sebagai pendalaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia serta upaya-upaya yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi.

3. Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawainya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan laporan penelitian mengenai Kinerja Pegawai Bidang Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Bekasi. Peneliti membuat sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 Bab dan terdiri dari beberapa sub bab agar dapat memperjelas ruang lingkup dan permasalahan yang telah diteliti.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kerangka Teori

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta definisi operasional.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, desain penelitian, Teknik pengumpulan dan analisis data, tempat dan waktu, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, keadaan Geografis, Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tugas pokok dan fungsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, kemudian menyajikan pembahasan yang dibahas dalam penelitian dan menyajikan hasil penelitian.

Bab V

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil wawancara dengan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, kemudian adanya rekomendasi-rekomendasi yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis.